

PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN *ENTREPRENEURSHIP* LOKAL (Usulan Model Pembangunan Masyarakat Nusa Tenggara Timur)

Edi Purwanto

Dosen Manajemen Strategik dan Dinamika Persaingan Global
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Universitas Bunda Mulia, Jakarta
Email: epurwanto@bundamulia.ac.id

ABSTRACT

Tulisan ini mengkaji bagaimana teori Weberian yang melihat hubungan budaya dan pembangunan ekonomi dapat dikembangkan untuk pembangunan ekonomi NTT. Walaupun mayoritas penduduk NTT beragama Protestan, namun etos kerja Protestan yang dilihat Max Weber sebagai pendorong pembangunan ekonomi negara-negara Protestan Barat tidak nampak bekerja dalam masyarakat NTT yang dibuktikan dengan tingkat kemiskinan yang tinggi di provinsi tersebut. Namun dengan tetap mengacu pada teori Weberian McClelland, Bellah, Wong dan Dove, nilai-nilai agama atau budaya lokal dapat dikembangkan untuk mendorong pembangunan ekonomi di NTT. Itulah yang menjadi usulan model pembangunan bagi Nusa Tenggara Timur.

Kata kunci: Kemiskinan, teori modernisasi, Max Weber, weberian, pembangunan, Nusa Tenggara Timur

1. PENDAHULUAN

The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism adalah salah satu karya monumental Max Weber. Buku tersebut memformulasikan tesis hubungan antara nilai-nilai agama dan kultur dengan semangat kapitalisme, khususnya di kalangan masyarakat Protestan Barat. Christopher *et al* (2002:741) berkata, "*The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism* karya Max Weber menyediakan justifikasi moral dan agama untuk akumulasi kekayaan dan kebangkitan kapitalisme." Menurut Tawney (2007:16), "Kebanyakan ilustrasi yang Weber pakai dalam tesisnya diambil dari tulisan-tulisan kaum Puritan Inggris pada paro kedua abad ke-17. Ajaran-ajaran mereka memberi Weber berbagai materi untuk mendapatkan gambaran *bourgeois* yang taat dan setia pada agamanya dan yang menjalankan bisnisnya sebagai suatu panggilan yang telah diperintahkan oleh Tuhan kepada mereka yang terpilih" (Purwanto, 2013).

Tesis Max Weber tersebut didukung oleh sejumlah tokoh seperti David C. McClelland (1961), Ronald Inglehart (2006), Mariano Grondona (2006) yang menjelaskan bahwa kemajuan bangsa Protestan Barat yang lebih unggul dibandingkan khususnya dengan bangsa berbasis budaya Katolik oleh karena didukung prinsip etos kerja Protestan. Prinsip Weberian kemudian juga digunakan untuk menjelaskan etos kerja yang tidak terbatas dalam nilai-nilai Protestantism, namun etos kerja yang sama dapat ditemukan dalam agama-agama di luar Protestan seperti yang ditemukan oleh Robert N. Bellah (2008) dalam agama Tokugawa di Jepang. Slabbert *et al* (2011), Zhang *et al.* (2012), dan Leong *et al* (2013) juga menemukan bahwa nilai-nilai etos kerja yang serupa ditemukan dalam budaya *Dynamism Confucianism*. Arslan (2001), Bozkurt *et al* (2010), dan Zulfikar (2012), menemukan bahwa etos kerja yang sama ditemukan dalam Islam yang khususnya didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist.

Kemudian muncul pertanyaan, mengapa Nusa Tenggara Timur yang didominasi oleh masyarakat Kristen tidak menunjukkan adanya kemakmuran yang menjadi logika Weberian? Sebagaimana dijelaskan oleh Myers *et al* (2012), Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah salah satu dari provinsi-provinsi termiskin di Indonesia. Mayoritas penduduk NTT (80%) tinggal di daerah-daerah pedesaan dan mata pencaharian mereka sebagian besar bergantung pada pertanian. Produksi dan penyimpanan bahan makanan dan kelaparan sering terjadi di area-area pedesaan. Musim kering selama enam sampai delapan bulan pertahun, biasanya dari Mei sampai Oktober juga merupakan salah satu alasan keterbatasan utama bagi produktivitas pertanian di NTT (Myers *et al.*, 2012:135).

Kemiskinan menjadi salah satu masalah di NTT, yang mana jumlah penduduk miskin mencapai 58% pada tahun 2005 dan turun menjadi 28% pada tahun 2008 (Suwondo, 2013:84), 20,48% pada tahun 2011, 20,88% pada tahun 2012 dan 20,41% pada tahun 2013 (BPS, 2013:48).

2. TEORI-TEORI PEMBANGUNAN

Para ahli pendukung teori modernisasi klasik melihat perlunya modernisasi bagi negara-negara berkembang untuk dapat mencapai kemajuan seperti yang dialami oleh negara-negara maju dengan menapaki jalan yang sama yang pernah dilalui oleh negara-negara maju. Untuk mencapai tujuan tersebut ada proses yang harus dilalui oleh negara-negara berkembang, misalnya; (1) Rostow melihat modernisasi merupakan proses bertahap, kemudian (2) Levy melihat bahwa modernisasi itu juga dapat dikatakan sebagai proses homogenisasi, (3) modernisasi terkadang mewujudkan dalam bentuk lahirnya proses *Eropanisasi* atau *Amerikanisasi* atau melalui proses dan tahapan modernisasi yang sama dengan Barat; (4) suatu proses yang bergerak maju dan merupakan perubahan progresif serta memerlukan waktu yang panjang. Dalam rangka mencapai status modern tersebut, struktur dan nilai-nilai tradisional secara total harus digantikan dengan seperangkat struktur dan nilai-nilai modern atau Barat (Suwarsono & So, 2006:21-23).

David McClelland berpendapat bahwa kaum wiraswastawan domestiklah dan bukan para politikus dan para penasihat ahli yang didatangkan dari negara maju yang memegang peran kritis dan bertanggung jawab terhadap pencapaian kemajuan negara berkembang (Dunia Ketiga). "Kegiatan para wiraswastawan tersebut bukan hanya sekedar mencari dan mengumpulkan laba," namun "keinginan yang kuat untuk mencapai prestasi gemilang yang dikerjakannya melalui penampilan kerja yang baik, dengan selalu berpikir dan berusaha untuk menemukan cara-cara baru untuk memperbaiki kualitas kerja yang dicapainya" (Suwarsono & So, 2006:23). Dengan demikian McClelland tidak mendukung prinsip-prinsip yang diusulkan oleh para ahli teori modernisasi klasik di atas.

Robert N. Bellah yang menggunakan prinsip Weberian mencoba mengamati kaitan antara agama Tokugawa dengan pembangunan ekonomi di Jepang menemukan nilai-nilai atau etos kerja seperti kerja keras, *asceticism* dan investasi yang ada dalam agama Tokugawa baik melalui pranata politik maupun pranata keluarga yang telah membawa pembangunan ekonomi di Jepang (Suwarsono & So, 2006:36-41). Sama halnya dengan McClelland, Bellah tidak mendukung homogenisasi atau *Eropanisasi* atau *Amerikanisasi* atau *Westernisasi* ("*Protestanisasi*") seperti yang dianjurkan oleh para ahli teori modernisasi klasik di atas. Sebaliknya Bellah justru melihat nilai-nilai "lokal" atau "domestik" dan bukan "Barat" atau "Protestan" yang menyimpan etos kerja yang dapat menjadi pemacu pembangunan ekonomi Jepang.

Demikian juga halnya dengan Wong Siu-Lun yang menolak saran dari para penganut modernisasi klasik untuk membuang jauh-jauh sistem nilai yang ada pada pranata keluarga Cina jika Cina hendak mempromosikan pembangunan (Suwarsono & So, 2006:58). Max Weber pernah menulis buku yang berjudul "*Konfuzianisme und Taoisme*" (1915) yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris pada tahun 1951 dengan judul *The Religion of China: Confucianism and Taoism*. Dalam buku tersebut Weber memfokuskan pada aspek-aspek masyarakat Cina yang berbeda dari Eropa Barat dan Puritanisme, dan mengajukan pertanyaan mengapa kapitalisme tidak berkembang di Cina (Purwanto, 2013:15). Mengapa kapitalisme tidak muncul di Cina? Jawaban umum Weber adalah bahwa kendala sosial, struktural, dan religius di Cina mencegah berkembangnya kapitalisme (Ritzer *et al* 2008:164). Sebaliknya, Wong justru melihat bahwa pranata keluarga Cina yang paternalistik, patrimonialis dan mode pemilikan keluarga atas usaha membantu keberhasilan usaha etnis Tionghoa di Hong Kong. Wong tidak melihat pranata keluarga Cina sebagai faktor penghambat pembangunan, dan justru sebaliknya pranata keluarga tradisional tersebut akan mampu membentuk etos ekonomi dinamis (Suwarsono & So, 2006:58-60).

Michael R. Dove mencoba untuk melihat interaksi antara kebijakan pembangunan nasional Indonesia dengan aneka ragam budaya lokal yang ada di Indonesia. Tanpa ragu-ragu Dove menyatakan bahwa tradisional tidak harus dimaknai sebagai keterbelakangan dan budaya tradisional

sangat dan selalu terkait dengan proses perubahan ekonomi, sosial dan politik dari masyarakat setempat di mana budaya tradisional tersebut melekat. Oleh sebab itu bagi Dove budaya tradisional selalu mengalami perubahan yang dinamis dan tidak mengganggu proses pembangunan (Suwarsono & So, 2006:62).

3. ETOS KERJA MENURUT WEBERIAN

Kembali ke fokus pembahasan, karena sebagian Kabupaten/Kota NTT mayoritas penduduk Protestan, maka masuk akal untuk membahas tentang kemungkinan nilai-nilai modernisasi Eropa dan Amerika Serikat atau Barat yang mencapai kemajuan mereka oleh karena peran etos kerja Protestan dalam perspektif Weberian. Dari perspektif para ahli teori modernisasi klasik kemajuan negara berkembang akan didukung dengan disingkirkannya nilai-nilai “tradisional” atau “lokal” atau “domestik” dengan menggantikannya dengan nilai-nilai “modern” atau “Barat” (Protestanisme). Dalam kasus NTT yang mayoritas berpenduduk Protestan tersebut, apakah itu artinya bahwa nilai-nilai modern sudah tertanam dalam masyarakat tersebut? Sebelum lebih jauh menghubungkan nilai-nilai pembangunan Barat (etos kerja Protestan) dengan pembangunan di NTT, lebih dahulu perlu untuk membahas etos kerja Protestan menurut teori Weberian.

Menurut Zang *et al.* (2012) *Protestant Work Ethic* (PWE) adalah suatu konsep multidimensional. Dengan menggunakan Skala PWE yang dikembangkan oleh Mirels dan Garrett (1971) dengan sample yang diambil dari para mahasiswa di Taiwan, Tang (1993) mengembangkan empat faktor dari PWE, yaitu: kerja keras, motif internal, asketikism, dan sikap terhadap perilaku bermalas-malasan atau bersenang-senang (*leisure*). Dengan menggunakan skala yang sama, McHoskey (1994) merepresentasikan empat faktor, yaitu: sukses, asketikisme, kerja keras, dan *anti-leisure*. Wentworth dan Chell (1997) menemukan lima faktor yang muncul, yaitu tidak menyalakan waktu (*person's use of time*), memandang rendah perilaku santai (*disdain for leisure*), kerja keras, upah kerja, dan merendahkan kemalasan (*disdain for indolence*). Arslan (2001) menemukan lima faktor, yaitu: bekerja sebagai tujuan akhir itu sendiri, kerja keras membawa kesuksesan, menghemat uang dan waktu, *internal locus of control*, dan sikap negatif terhadap perilaku santai (*negative attitudes to leisure*) (Purwanto, 2013:18).

Analisis faktor yang dilakukan Bozkurt (2010) atas 19 skala yang dikembangkan oleh Mirels dan Garrett (1971) tersebut terbentuk dalam 5 dimensi PWE dengan faktor-faktor berikut ini:

Faktor 1: *Effort* dengan indikator-indikator seperti berikut ini: orang yang gagal dalam pekerjaannya biasanya karena kurang cukup berusaha dengan keras; kebanyakan orang menghabiskan banyak waktu untuk kesenangan-kesenangan yang tidak bermanfaat; masyarakat akan memiliki banyak masalah bila orang-orangnya memiliki banyak waktu untuk bersantai; kebanyakan orang yang tidak berhasil dalam hidupnya hanya karena malas; hidup akan memiliki sangat sedikit arti bila kita tidak pernah menderita; merasa gelisah ketika ada sedikit pekerjaan untuk dilakukan.

Faktor 2: *Hard Work* dengan indikator-indikator seperti berikut ini: jika seseorang cukup bekerja keras, itu akan membuat kehidupan yang baik bagi dirinya sendiri; ketidaksukaan untuk bekerja keras biasanya merefleksikan kelemahan karakter; orang yang dapat mengerjakan tugas yang tidak menyenangkan dengan antusias adalah orang yang akan menjadi yang terdepan; bekerja keras menawarkan jaminan sukses; seseorang yang mampu dan mau bekerja keras memiliki kesempatan yang baik untuk sukses; dan ada kepuasan dengan menyadari suatu pekerjaan telah dilakukan dengan usaha terbaik.

Faktor 3: *Saving* dengan indikator-indikator seperti berikut ini: uang yang diperoleh dengan mudah (misalnya melalui judi atau spekulasi) biasanya dihabiskan secara tidak bijak dan menggunakan uang pinjaman bukan untuk kebutuhan investasi (misalnya kartu kredit) adalah tiket menghabiskan uang secara ceroboh

(4) Faktor 4: *Asceticism and Independence from Others* dengan indikator-indikator seperti berikut ini: seseorang ingin lebih sukses maka ia harus mau mengorbankan kesenangan-kesenangan tertentu; seorang yang berusaha membuat diri sendiri kaya lebih etis dibandingkan seseorang yang dilahirkan dalam kekayaan; mata pelajaran di perguruan tinggi yang paling sulit biasanya berubah menjadi yang paling berharga.

(5) Faktor 5: *Anti-leisure* dengan indikator-indikator seperti berikut ini: hidup akan lebih bermakna jika seseorang tidak memiliki banyak waktu luang dan orang yang memiliki lebih banyak waktu luang untuk dihabiskan dalam relaksasi akan membawa hidupnya tidak bermakna atau mengalami masalah.

Jones (1997) menggambarkan model Weber tentang etos kerja tersebut bahwa (1) ada korelasi antara *personal asceticism* dengan *religious beliefs* yang mana keduanya mempengaruhi etika Protestan; (2). Etika Protestan tersebut akan menyebabkan anggotanya untuk bekerja keras (*hard work*), memanfaatkan waktu dengan baik (*use of time*), kebiasaan menabung (*saving*), meningkatkan kreativitas dan inovasi (*innovation*) dan menjunjung kejujuran (*honesty*), (3) yang mana kelima faktor tersebut akan mendatangkan berkah dari Tuhan, yaitu kekayaan (*Devine reward/wealth*) bagi yang menjalankannya.

Apakah nilai-nilai etos kerja Protestan sebagaimana dijelaskan di atas telah tertanam dengan baik dalam masyarakat NTT yang mayoritas Protestan? Kalau benar demikian bukankah mereka sudah memiliki modal menuju pembangunan sebagaimana dipikirkan oleh para ahli teori pembangunan modernisasi klasik? Lalu jika teori para ahli pembangunan modernisasi klasik tersebut sah, mengapa NTT bahkan justru masih terdaftar sebagai salah provinsi termiskin di Indonesia? Apakah teori Max Weber yang tidak sah? Atau teori para ahli modernisasi klasik yang tidak sah? Atau nilai-nilai Protestanisme belum sepenuhnya tertanam dalam masyarakat NTT? Semua itu adalah pertanyaan-pertanyaan menarik untuk direnungkan!

4. TESIS WEBER TIDAK BEBAS DARI TEBA RUANG DAN WAKTU

"Teba ruang dan waktu menyangkut di mana (tempat) dan kapan (waktu) sebuah teori itu berlaku" (Ihalauw, 2008:149). Menurut Ihalauw (2008) teori Weber tentang etika Protestan dan semangat kapitalisme tampaknya relevan untuk budaya-budaya Barat, namun tidak tampak di beberapa daerah di Indonesia di mana pemeluk agama Kristen Protestan relatif dominan, dan bahkan justru kemiskinan amat kentara (Ihalauw, 2008:149).

Data pada *NTT dalam Angka 2013* menunjukkan bahwa beberapa Kabupaten/Kota di NTT mayoritas penduduk beragama Kristen Protestan, misalnya Sumba Barat 57,784 %, di Sumba Timur 81,354%, di Kupang 87,102%, di Timor Tengah Selatan 82,219%, di Alor 66,395%, di Rote Ndao, 92,228%, di Sumba Tengah 88,285%, dan di Kota Kupang 61,081 %. Di Timor Tengah Utara dan Belu presentase jumlah penduduk Protestan menempati peringkat kedua. Di Lembata, Flores Timur, Shika, Ende, Ngada, Manggarai, Manggarai Barat dan Nagekeo penduduk Protestan adalah minoritas (BPS, 2013:171).

Presentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota yang berpenduduk mayoritas Protestan, misalnya di Sumba Barat sebesar 29,61 %, di Sumba Timur 30,35%, di Kupang 20,13%, di Timor Tengah Selatan 27,53%, di Alor 20,06%, di Rote Ndao, 29,11%, di Sumba Tengah 32,1%, dan di Kota Kupang 9,41 %. Dibandingkan dengan Kabupaten lainnya di mana Protestan bukanlah penduduk mayoritas, Kabupaten yang mayoritas Protestan memiliki presentase kemiskinan lebih tinggi. Misalnya di Flores Timur di mana penduduk Protestan minoritas presentase kemiskinannya hanya 9,14 % (BPS, 2013:440).

Antara jumlah mayoritas penduduk Protestan dan fakta kemiskinan di NTT memunculkan kembali pertanyaan-pertanyaan berikut ini: Apakah etos kerja Protestan tidak bekerja di NTT? Atau apakah tesis Weber tidak relevan pada kasus di NTT? Mengapa bisa terjadi? Atau ada hal lain yang perlu disoroti selain hanya berfokus pada etos kerja, misalnya kondisi-kondisi yang memediasi etos kerja tersebut menuju kapitalisme atau kemakmuran?

Menelusuri lebih jauh tesis Weber tentang etos kerja Protestan dan semangat kapitalisme ada beberapa kondisi yang memiliki peran penting dalam memfasilitasi etos kerja Protestan menuju pembangunan ekonomi masyarakat Barat menjadi penting di sini.

Weber melihat ideologi Puritanisme sebagai landasan pembentuk etos kerja Protestan. Buku *Christian Directory* karangan seorang pendeta Puritan yang bernama Richard Baxter dari Inggris banyak menjadi rujukan Weber dalam *The Protestant Ethic and Spirit Capitalism* khususnya dalam penekanannya tentang etos kerja yang didorong oleh ideologi Puritanisme. Jonathan Edwards, seorang pengkhotbah Puritan dan Benjamin Franklin sebagai tokoh Protestanisme disebut-sebut sebagai tokoh yang mempengaruhi etos kerja Protestan di antara masyarakat Amerika Serikat.

Seorang Puritan dari Inggris, Wooldridge meringkaskan ajaran Baxter tentang bekerja dan sikap terhadap kekayaan seperti berikut ini: Pertama, pengajaran Baxter tentang bekerja adalah bahwa pekerjaan bagi seorang Kristen adalah suatu panggilan Tuhan, dan oleh sebab itu, (a) Orang Kristen harus memiliki suatu panggilan Tuhan dalam hidupnya, (b) Orang Kristen harus dengan hati-hati memilih panggilannya, (c) Orang Kristen harus bekerja keras dalam memenuhi panggilannya, entah ia seorang tuan tanah atau hamba atau pedagang. Kedua, pengajaran Baxter tentang kekayaan adalah bahwa; (a) kekayaan adalah upah bagi mereka yang rajin bekerja, (b) namun harus diingat bahwa kekayaan juga merupakan suatu bahaya bagi keselamatan, (c) kekayaan adalah sebuah talenta yang seharusnya tidak digunakan untuk hal-hal yang salah (misalnya untuk berjudi, berfoya-foya, atau menikmati kesenangan duniawi), namun kekayaan harus digunakan untuk investasi, kekayaan harus digunakan dengan sehemat mungkin sesuai dengan kebutuhan kita, dan kekayaan harus digunakan untuk hal-hal yang baik dan positif (Wooldridge, 1958: 44-51).

Apakah ciri-ciri itu hanya ditemukan dalam Puritanisme? Ini pertanyaan yang menarik. Karena menurut Daniel Bell ketika masyarakat pasca-industri meninggalkan dan bahkan menentang prinsip Puritanisme, etos kerja Protestan telah digantikan oleh hedonisme (Bell, 1978). Temuan penelitian Arslan (2001), Bozkurt *et al* (2010), dan Zulfikar (2012) menunjukkan menurunnya dukungan masyarakat Protestan terhadap PWE di Inggris, Amerika Serikat dan Australia pasca-industri, sementara di sisi lain justru ditemukan meningkatnya dukungan masyarakat Muslim Turki dan Kyrgyztan terhadap etos kerja (PWE) di atas dukungan masyarakat Protestan itu sendiri. Oleh sebab itu, karakteristik Puritanisme secara khusus menjadi pendorong etos kerja Protestan.

Selanjutnya dapat dilihat apakah karakteristik Protestanisme NTT menunjukkan Puritanisme? Kalau dilihat dari sudut pandang latar belakang pendidikan teologi pendeta di gereja-gereja *arus utama* di NTT, sebagian besar berasal dari perguruan tinggi teologi pendukung teologi modern, neo-orthodoks atau bahkan liberal, yang merupakan kebalikan dari karakteristik Puritanisme. Semangat inkulturasi Protestanisme ke dalam budaya dan adat lokal juga mencolok dari tulisan-tulisan para teolog atau pemimpin agama Protestan *arus utama* di Indonesia pada umumnya maupun di NTT. Sehingga Prabowo mengatakan bahwa validitas tesis Weber pada provinsi atau kota/kabupaten di Indonesia, yang memiliki umat Kristen mayoritas atau signifikan masih sumir. Etika Protestan tampak kalah bersaing dengan faktor-faktor lain. Salah satu penyebabnya adalah karena adanya upaya gereja dalam inkulturasi di masyarakat setempat membuat gereja kurang kritis terhadap nilai adat setempat (Suara Pembaharuan, 14 Maret 2009). Kuatnya peran adat dan norma-norma "agama suku" di NTT dibandingkan Protestanisme nampak dalam sejumlah hasil penelitian terdahulu (Sayogyo, 1994, Sitorus & Weka, 1994, Iskandar & Djoeroemana, 1994, Soetarto, 1994, Soemardjo, 1994).

Namun demikian dengan mendasarkan pada pemikiran Weberian, Palekahelu menemukan adanya hubungan antara agama suku *Marapu* dalam mendorong para pengikutnya untuk bekerjasama dan bekerja keras untuk mempertahankan kehidupan dalam masyarakat NTT. Palekahelu menjelaskan "jika kerja keras dan hidup hemat kelompok Calvinist terkait dengan nilai panggilan atau *calling*, maka dalam agama suku *Marapu*, nilai-nilai positif ini lebih terkait dengan nilai solidaritas dan saling menolong. Mereka harus bekerja keras agar dapat menolong dirinya sendiri dan sesamanya. Agama menjadi pengikat atau sumber identitas yang menguatkan mereka dalam bertindak bersama (Polletta and Jasper, 2001, Palekahelu, 2010: 251-252). Jika "agama lokal"

Marapu dapat menjadi pendorong etos kerja dari perspektif Weberian, dan jika pengaruh *Marapu* lebih kuat dari Protestanisme, maka dengan mengacu pada penelitian ala Weberian oleh Robert N. Bellah bahwa agama Tokugawa menjadi pendorong etos kerja masyarakat Jepang, dan penelitian Slabbert *et al* (2011), Zhang *et al.* (2012), dan Leong *et al* (2013) yang menemukan bahwa nilai-nilai etos kerja ditemukan dalam budaya *Dynamism Confucianism* atau Arslan (2001), Bozkurt *et al* (2010), dan Zulfikar (2012) yang menemukan bahwa etos kerja ditemukan dalam masyarakat Islam, maka *Marapu* juga dapat digali dan dijadikan pendorong etos kerja masyarakat NTT untuk bangkit dari kemiskinan menuju kemakmuran.

Masyarakat di mana etos kerja Protestan dan semangat kapitalisme bertumbuh adalah masyarakat industri dan komersil. Weber (1968) menjelaskan bahwa di Baden, Bavaria, Hungaria sementara orang-orang lebih cenderung tetap bekerja dalam dunia kerajinan mereka (menjadi *craftman master*), orang-orang Protestan lebih tertarik bekerja di pabrik-pabrik untuk mengisi posisi-posisi administratif. Di Jerman keterlibatan orang Katolik sangat kecil dalam kehidupan bisnis yang merupakan kebalikan Protestanisme (Weber, 2007:44-45). Menurut Weber “keterlibatan yang lebih besar dari orang-orang Protestan pada posisi-posisi kepemilikan dan manajemen dalam kehidupan ekonomi modern bisa dipahami secara sederhana sebagai suatu akibat dari kekayaan material yang lebih besar yang telah mereka warisi” (Weber, 2007:44). Menurut Montesquieu sebagaimana dikutip oleh Weber, orang-orang Protestan Inggris telah berkembang pesat daripada bangsa-bangsa lain di dunia dalam tiga hal, yaitu: spiritualitas, perdagangan dan kebebasan (Weber, 2007:44).

Perbedaan lain antara masyarakat Katolik dan Protestan pada zaman itu menurut Weber adalah bahwa jika orang-orang Katolik ingin “tidur enak”, sebaliknya orang-orang Protestan ingin “makan enak” (Weber, 2007:47). Yang pertama didorong oleh keinginan *leisure*, sementara yang kedua memotivasi untuk kerja keras. Bekerja di bidang industri dan perdagangan membutuhkan ungkapan ingin “makan enak.” Sementara ungkapan “tidur enak” tidak dapat mendukung pekerjaan di bidang tersebut.

Modal sosial menjadi penting dalam kebangkitan kapitalisme Protestan di Amerika Serikat. Dalam pengamatan Weber (1946) jaringan yang dibangun di atas kejujuran dan kepercayaan dalam satu denominasi gereja, misalnya gereja-gereja Baptis di Amerika Serikat, menjadi jaminan kerja dan akses kepada modal. Berada di luar jaringan berarti terputus dari akses kepada pekerjaan atau modal yang didominasi oleh denominasi tersebut (Weber, 2009:362-366).

Dari beberapa penjelasan Weber di atas dapat dilihat gambaran struktur sosial yang mengkondisikan etos kerja Protestan memimpin kepada pembangunan dan kemakmuran masyarakat Protestan. Beberapa hal yang dapat dilihat sebagaimana terimplikasi dalam penjelasan Weber tersebut adalah: (1) Masyarakat Protestan pada umumnya menekuni pekerjaan di bidang industri dan bisnis dan perdagangan; (2) jenis pekerjaan tersebut menuntut kerja keras, memanfaatkan waktu dengan baik dan investasi; (3) jenis pekerjaan tersebut membutuhkan akses kepada modal untuk investasi (misalnya warisan atau pinjaman); (4) dalam jenis pekerjaan tersebut modal dapat terakumulasi secara cepat yang terus diinvestasikan kembali secara terus menerus, (5) jaminan kebebasan menjadi sangat diperlukan untuk dapat memperlancar pekerjaan tersebut. Itulah prinsip kapitalisme.

Apakah struktur sosial semacam itu ditemukan dalam masyarakat Protestan di NTT? Secara keseluruhan orientasi ekonomi beberapa desa masih sangat bersifat subsisten, yaitu hanya untuk kepentingan konsumsi rumah tangga. Menurut Sitorus dan Weka (1994), sifat subsisten ekonomi itu dengan sendirinya adalah indikator kemiskinan karena merupakan fungsi dari produktivitas kegiatan usaha tani dan non-usaha tani yang rendah. Produktivitas yang rendah menyebabkan pendapatan rendah. Kemiskinan dalam perspektif masyarakat desa (kasus di Kabupaten Ende) senantiasa dikaitkan dengan pertanian, kesehatan, kepemilikan dan kekuasaan. Miskin dalam perspektif masyarakat desa digambarkan dengan ungkapan *kuru tuu fau samba* (tanah kering dan tandus) atau *lolo tolo tobo pare dere mera* (tanaman terserang hama dan penyakit). Sementara konsep kemakmuran digambarkan dengan ungkapan *tedo tembu wesa wela* atau *gaga boo kewi ae* (tanah subur), *jawa dup aria pare wole bewa* (tanaman berhasil), *peni nge wesi nuwa* (ternak berkembang

biak), *tebo mae ro lo mae leko* (sehat walafiat), *sao ria tenda bewa* (rumah besar), *wiwi ria lema bewa* (berkuasa), dan *poke nge wela dero* (kemampuan ekspansi tanah) (Sitorus dan Weka, 1994:43). Perekonomian desa yang masih bersifat agraris dan subsisten dengan sistem ladang berpindah-pindah yang bersifat eksploitatif dan tidak taat pada azas konservasi mengarah pada pemiskinan tanah yang pada gilirannya juga mengarah pada pemiskinan penduduk yang menggantungkan ekonomi mereka pada tanah itu (Sitorus dan Weka, 1994:54).

Kemiskinan dalam perspektif masyarakat di Kabupaten Sumba Barat juga berkaitan pertanian dan peternakan. Miskin dalam istilah masyarakat Sumba Barat adalah *mila* atau *mila-jana* dan orang miskin disebut *tau mila* atau *ata mila*. Rumah tangga yang tidak memelihara kuda atau kerbau, ayam dan atau babi, serta tidak mengusahakan tanah akan dikatakan sebagai rumah tangga miskin. Rumah tangga yang sama sekali tidak mempunyai ternak dan tidak menggarap tanah tergolong rumah tangga yang teramat miskin (*mila-jara*) (Iskandar & Djoeroemana, 1994:66-67).

Menurut Sayogyo (1994) kehidupan penduduk di empat kabupaten (Kupang, Timor Tengah Selatan, Ende dan Sumba Barat) masih bertumpu pada sektor agraris, dengan produktivitas tanah pertanian yang tergolong rendah. Selain itu mereka tidak memiliki motivasi dan inisiatif untuk berusaha dan kurang mampu menangkap peluang ekonomi yang tersedia. Bahkan di Kupang, penduduk yang mencari nafkah di luar pertanian dengan merantau dinilai oleh masyarakat sebagai orang miskin karena kepergian mereka disebabkan tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan dengan ladang yang tersedia (Sayogyo, 1994:127).

Kurangnya penguasaan teknologi bagi para petani untuk mengembangkan pertanian. Pengembangan tanaman perdagangan tidak memberikan hasil yang optimum untuk peningkatan pendapatan petani, khususnya pada studi kasus di Wonda oleh Sitorus dan Weka (1994) karena (1) petani belum menguasai teknologi budidaya dan teknologi paska panen secara memadai, (2) petani belum memiliki sikap bisnis yang memadai, (3) petani mengalami kesulitan dalam pemasaran hasil pertanian mereka karena kurang memiliki informasi harga dan masalah transportasi yang tidak mendukung.

Lembaga Riset SMERU menjelaskan bahwa pembangunan di provinsi NTT belum mengikuti pola umum perkembangan perekonomian, di mana peranan sektor pertanian mulai digantikan oleh sektor industri dan jasa. Sektor industri di NTT tidak mengalami perkembangan berarti sehingga sektor ini tidak berperan dalam mengurangi kemiskinan di sektor pertanian. Perkembangan sektor jasa juga masih terlalu kecil dan cenderung rapuh karena tidak didukung oleh sektor industri yang menciptakan nilai tambah bagi sektor pertanian (SMERU, 2006:9).

Sekalipun etos kerja dimiliki masyarakat Atoni Pah Meto di NTT seperti dijelaskan oleh Elias dalam disertasinya tentang etos kerja masyarakat NTT, namun mereka tetap bergantung pada ekonomi subsisten. Jadi masyarakat NTT masih lebih menggantungkan hidup mereka pada pertanian dan peternakan dan ekonomi subsisten. Musim kemarau yang panjang (8 bulan) menyebabkan pertanian juga tidak produktif. Pekerjaan-pekerjaan mereka bersifat subsisten atau hanya untuk menyambung hidup. Jenis pekerjaan tersebut tidak menuntut kerja keras sepanjang waktu sebagaimana dalam bidang bisnis, industri dan perdagangan, karena selama musim kemarau tidak banyak yang dapat dilakukan selain memelihara ternak mereka. Untuk pekerjaan jenis ini waktu banyak terbuang dengan sia-sia, sehingga akumulasi modal tidak terjadi, karena hasil pertanian hanya cukup untuk sekedar menyambung hidup. Selain karena kurang mampu untuk berbisnis atau berdagang atau membuka industri, akses kepada modal juga merupakan kesulitan lain bagi mereka. Mereka juga membutuhkan modal sosial yang dibangun di atas kejujuran dan kepercayaan (misalnya dalam denominasi gereja mereka) dan tentu juga perlunya modal finansial tersedia di dalam jaringan tersebut.

Perbandingan di atas menunjukkan adanya perbedaan kondisi struktur sosial antara keduanya. Ada struktur sosial yang memfasilitasi keberhasilan kapitalisme dalam masyarakat Protestan di Eropa maupun Amerika Serikat yang tidak dimiliki oleh masyarakat NTT. Itulah sebabnya etos kerja Protestan Weberian tidak nampak bekerja dalam masyarakat NTT yang mayoritas Protestan sekalipun.

5. USULAN MODEL PEMBANGUNAN DI NTT

Mengacu pada pemikiran McClelland, membangkitkan motivasi wiraswastawan lokal NTT menjadi penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang tidak hanya menggantungkan pada pertanian dan peternakan. Mereka harus mulai mengembangkan masyarakat untuk menyadari masih ada hal lain atau peluang lain yang dapat mereka kerjakan yang akan mendatangkan kemakmuran selain hanya melalui pertanian atau peternakan, yaitu industri yang dalam kasus NTT semakin merosot daripada maju, dan juga perdagangan. Karena luas wilayah terbesar NTT bukan daratan, namun lautan, Suwondo (2013) juga pernah mengusulkan agar pembangunan NTT tidak terlalu ditekankan hanya pada pengembangan bidang pertanian atau paradigma daratan, namun juga kelautan. Posisi strategis wilayah laut yang berbatasan langsung dengan Australia, Timor Leste dan Papua New Guinea, NTT dapat mengembangkan diri dan berkomunikasi secara regional, karena menurut Ghani dan Lockhart (2008) kemajuan negara di era globalisasi belakangan ini akan terjadi bila negara tersebut mampu membangun relasi positif dengan negara lain dalam konteks regional. Sehingga menurut Suwondo (2013) posisi strategis tersebut tidak mengharuskan NTT sangat bergantung pada Pusat (Jakarta) dalam membangun komunikasi regional dalam perdagangan dan industri yang menjanjikan kemajuan bagi NTT (Suwondo, 2013:82).

Sebagai Provinsi dengan 81% wilayah laut dan hanya 19% wilayah daratan, dengan memiliki 674 pulau dan 242 pulau yang “belum bernama,” sebagai wilayah kepulauan “dilihat dari segi pariwisata maka banyaknya pulau-pulau tersebut dapat menjadi zona turisme yang eksklusif dan menjanjikan” (Suwondo, 2013:82). Suwondo juga mengatakan bahwa “adanya laut yang cukup luas memungkinkan pengembangan produksi kelautan yang juga bermacam-macam” (Suwondo, 2013:82).

Misi ketiga dari delapan misi Provinsi NTT 2014-2018 adalah “memberdayakan ekonomi rakyat dan mengembangkan ekonomi keparawisataan dengan mendorong pelaku ekonomi untuk mampu memanfaatkan keunggulan potensi lokal” (<http://nttprov.go.id/new/index.php/2014-03-13-05-53-28/2014-03-13-23-33-53/visi-misi>). Bila misi ini dapat berjalan dengan baik sepanjang periode perencanaan tersebut maka diharapkan peningkatan kualitas angkatan kerja, perluasan kesempatan kerja, revitalisasi institusi ekonomi dan peningkatan produk dan stabilitas harga produk ekonomi rakyat dapat terwujud menuju pembangunan NTT.

Pengalaman Atlantic Canada dalam pengembangan *entrepreneurship* dapat menjadi contoh yang mungkin dapat diterapkan dalam pembangunan *entrepreneurship* di NTT. Pada tahun 1988, Canada adalah negara berkembang pertama yang menerapkan kebijakan nasional untuk masalah *Entrepreneurship*. Mempertimbangkan peran krusial yang dimainkan oleh *entrepreneurship* dan pendirian perusahaan-perusahaan baru dalam pembangunan regional, ekonomi dan sosial Canada, maka pemerintahan federal menggariskan kebijakan untuk mempromosikan semangat budaya *entrepreneurial* dan meningkatkan efektivitas dari dukungan pemerintah untuk *entrepreneurship* (OECD, 1996).

Atlantic Canada berpenduduk 2.4 juta jiwa; 45% penduduk tinggal di area pedesaan. Angka pengangguran adalah yang paling tinggi di Canada dan wilayah ini sangat bergantung pada dukungan pemerintah, bantuan dari pemerintah pusat (*federal transfer payments*) dan *resource-based industries*. Pada bulan Juni 1987, Pemerintah Federal/Pusat mendirikan *Atlantic Canada Opportunities Agency* (ACOA) untuk menggantikan kebijakan pembangunan regional sebelumnya dan melaksanakan mandat pembangunan ekonomi dari Pemerintah Pusat untuk diterapkan di Atlantic Canada. Canada memiliki penduduk 29.8 million, 62% penduduk tinggal di provinsi Canada pusat, misalnya di Ontario (11 juta) and Quebec (7.4 juta). Empat provinsi di Atlantic Canada seluas 195,000 mil persegi, kira-kira seluas wilayah Francis atau 5% dari area Canada. Pada 1 Januari 1996, 2.4 juta orang hidup di wilayah ini, atau 8.1% dari total penduduk Canada. Kebanyakan penduduknya hidup di area pedesaan atau kota kecil di Atlantic Canada (45%), ketika 25% penduduk Canada hidup di area pedesaan. Pertumbuhan penduduk di Atlantic Canadian lebih lambat dari rata-rata pertumbuhan penduduk secara nasional. Ketika tingkat pertumbuhan penduduk secara nasional 49.7% sepanjang periode 30 tahun antara 1961 sampai 1991, peningkatan populasi Atlantic Canada

meningkat hanya 22.4%. Faktor-faktor yang mendukung ini termasuk di dalamnya tendensi penduduk Atlantic Canada yang bermigrasi ke wilayah Canada lainnya yang lebih makmur dan imigrasi ke provinsi-provinsi Canada yang lebih besar (OECD, 1996).

Program pendidikan dan pengembangan *entrepreneurship* lokal di Atlantic Canada sukses membawa pembangunan ekonomi wilayah tersebut. Pendidikan *entrepreneurship* ditanamkan mulai dari pendidikan dasar dan menengah dengan pengembangan kurikulum. Pendidikan juga disiarkan melalui media-media, seperti radio dan majalah. Hasilnya adalah bahwa 95% bisnis di Atlantic Canada adalah *SMEs* yang memiliki karyawan kurang dari 100 karyawan dan hampir 75% dari bisnis-bisnis ini memiliki karyawan kurang dari lima karyawan. Total jumlah bisnis terus bertumbuh dengan cepat dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan di tingkat nasional. Sepanjang periode tahun 1989 -1993, jumlah perusahaan-perusahaan kecil di wilayah ini meningkat sekitar 4.5% dibandingkan peningkatannya secara nasional, yaitu hanya 0.1%. Pertumbuhan yang paling kuat adalah kategori yang paling kecil (yang memiliki karyawan kurang dari 20 karyawan). Lebih dari 80% lapangan kerja baru secara konsisten dilahirkan oleh perusahaan-perusahaan kecil dan kira-kira 60% lapangan kerja baru di Atlantic Canada dilahirkan oleh bisnis-bisnis baru yang baru dimulai dalam periode tahun 1980-1989. Dari tahun 1980-89, hampir 75% jaringan *new jobs* di sektor pasar (tidak termasuk sektor publik) diciptakan dalam perusahaan-perusahaan yang memiliki kurang dari 5 karyawan, dan kebanyakan dari bisnis ini masih baru dan masih sangat muda dan perusahaan-perusahaan besar (dengan lebih dari 500 karyawan) mulai kehilangan "*jobs*". Total jumlah bisnis di Atlantic Canada pada periode tahun 1980-1989 bertambah 55% dari 55, 919 menjadi 86,314. Riset terbaru di sejumlah negara-negara OECD menunjukkan bukti yang kuat bahwa ada korelasi positif antara formasi-formasi bisnis baru dan pertumbuhan ekonomi (OECD, 1996).

Melihat pengalaman pembangunan *entrepreneurship* yang sukses di Atlantic Canada dapat menjadi pelajaran menarik untuk melihat kemungkinan pembangunan NTT melalui pendidikan dan pengembangan *entrepreneurship* lokal.

Mengacu pada pemikiran Bellah, jika nilai-nilai etos kerja Protestanisme memang kurang nampak dalam masyarakat NTT untuk mendorong pembangunan, maka nilai-nilai etos kerja lokal yang ditemukan dalam *Marapu* oleh Palekahelu (2010) atau etos kerja yang ditemukan Eliasar dalam masyarakat Atoni Pah Meto dapat dikembangkan menjadi pendorong atau pemberi motivasi kerja dan pembangunan sebagaimana agama Tokugawa telah mempengaruhi pembangunan ekonomi di Jepang. Apakah nilai-nilai tersebut bersifat umum di seluruh wilayah NTT? Jika demikian dapat dimanfaatkan sebagai pendorong pembangunan masyarakat NTT secara luas. Atau apakah nilai-nilai tersebut hanya ada di beberapa wilayah NTT? Jika demikian nilai-nilai tersebut dapat dijadikan pendorong pembangunan masyarakat setempat dan mencari kemungkinan nilai-nilai serupa dalam masyarakat lainnya sebagai pendorong demi terwujudnya pembangunan NTT.

Mengacu pada pemikiran Bellah dan Wong tentang bagaimana agama Tokugawa telah membangun pranata politik dan keluarga untuk selanjutnya menjadi pendorong pembangunan Jepang (Bellah) dan bagaimana pranata keluarga Cina di Hong Kong telah mempengaruhi pembangunan ekonomi di Hong Kong (Wong), maka pranata-pranata keluarga yang mungkin ada dalam masyarakat NTT dapat dikembangkan untuk memfasilitasi pembangunan NTT.

Menurut Sayogyo (1994) ada pranata sosial yaitu persekutuan hukum adat di NTT yang didasarkan pada prinsip hubungan kekerabatan (persekutuan hukum genealogis) dengan istilah yang berbeda antara satu dengan lainnya (*wewah* di Ende; *kabisu* di Sumba Barat; *kanaf* di Kupang dan Timor Tengah Selatan). Ikatan kekerabatan tersebut menjadi basis yang kuat dari suatu mekanisme tolong-menolong antarsaudara dalam rangka mewujudkan cita-cita yang sama. Di sana juga terdapat tolong menolong antarkerabat untuk menyekolahkan anak ke jenjang pendidikan tinggi dan keberhasilan si anak kelak menjadi keberhasilan seluruh keluarga (Sayogyo, 1994:155-156). Sehingga "tidak dapat dipungkiri bahwa dari daerah yang "miskin" telah lahir sejumlah putra-putri terbaik yang berkecimpung di berbagai bidang, seperti di pemerintahan, ekonomi, dunia akademik dan

berbagai bidang professional lainnya. Kenyataan ini merupakan salah satu indikator akan adanya potensi daerah yang memberikan harapan masa depan NTT” (Kameo, 2003:31).

6. KESIMPULAN

Walaupun nilai Protestanisme telah lama tertanam di NTT, namun nilai-nilai etos kerja Protestan yang menurut Max Weber dan Weberian telah menjadi faktor yang mempengaruhi negara-negara Barat (Protestan) tidak nampak bekerja dalam pembangunan masyarakat NTT. Sehingga mengacu pada teori modernisasi pembangunan McClelland, Bellah, Wong dan Dove, pembangunan NTT yang berbasis pada nilai-nilai lokal untuk memacu kebangkitan para *entrepreneur* lokal dapat diusulkan. Nilai-nilai etos kerja dalam *Marapu* atau budaya lokal lainnya di NTT dapat dikembangkan untuk mendorong semangat kerja, investasi dan akumulasi modal dalam bisnis dan industri demi kemakmuran NTT, sebagaimana dijelaskan oleh Bellah bahwa nilai-nilai lokal dalam agama Tokugawa yang mampu mempengaruhi pembangunan ekonomi Jepang. Pranata sosial persekutuan kekerabatan saling tolong menolong dapat dikembangkan untuk menjadi jaringan untuk membangun masyarakat NTT sebagaimana dijelaskan oleh Wong nilai-nilai kekerabatan dalam pranata keluarga Cina mendorong jaringan dan keberhasilan bisnis keluarga-keluarga di Hong Kong. Kekhasan budaya di NTT mungkin berbeda dengan budaya di wilayah-wilayah lain di Indonesia, namun mengacu pada teori Dove kekhususan budaya lokal NTT dapat dikembangkan untuk mendorong pembangunan NTT.

7. DAFTAR PUSTAKA

- _____ (2006). “Tantangan Pembangunan di Nusa Tenggara Timur” *The SMERU Research Institute*. No. 20: Oct-Dec/2006
- Arslan, M. (2001)., “The Work Ethic Values of Protestant British, Catholic Irish and Muslim Turkish Managers” in *Journal of Business Ethics*, 31, 321-339.
- Badan Pusat Statistik, 2013. *Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik, 2013. *Nusa Tenggara Timur dalam Angka*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bellah, Robert N (2008). *Tokugawa Religion: The Cultural Roots of Modern Japan*. Free Press; 2 edition.
- Bell, Daniel (1978). *The Culture Contradictions of Capitalism*, New York: Basic Books.
- Bozkurt, Veysel, and Nuran Bayram, and Adrian Furnham, and Glenn Dawes (2010). “The Protestant Work Ethic and Hedonism Among Kyrgyz, Turkish and Australian College Students” in *Drust. Istraz. Zagreb God.* 19, 749-769.
- Christopher, Andrew N. and Jones, Jason R (2002), “How is the Protestant Work Ethic Related to the Need for Cognition? A Factor Analytic Answer” in *Social Behavior and Personality*; 30, 8.
- Grondona, Mariano (2006). “Tipologi Budaya dari Pembangunan Ekonomi” dalam *Kebangkitan Peran Budaya: Bagaimana Nilai-Nilai Membentuk Kemajuan Manusia*, editor: Lawrence E. Harrison dan Samuel P. Huntington. Jakarta: LP3ES.
- Ihalauw, John JOI (2008). *Konstruksi Teori: Komponen dan Proses*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

- Inglehart, Ronald (2006). "Budaya dan Demokrasi" dalam *Kebangkitan Peran Budaya: Bagaimana Nilai-Nilai Membentuk Kemajuan Manusia*, editor: Lawrence E. Harrison dan Samuel P. Huntington. Jakarta: LP3ES.
- Iskandar, Margaharta and Siliwoloe Djoeroemana (1994). "Kemiskinan dan Pembangunan: Kasus Kabupaten Sumba Barat" dalam *Kemiskinan dan Pembangunan di Propinsi Nusa Tenggara Timur*, editor, Sayogyo. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kameo, Daniel Daud (2003). *Rekonstruksi Model Pembangunan Wilayah Berdasarkan Pendekatan Empirik: Pengalaman Daerah Nusa Tenggara Timur*. Salatiga: Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Satya Wacana.
- Leong, Frederick T. L., and Jason L. Huang, and Stanton Mak (2013). "Protestant Work Ethic, Confucian Values, and Work-Related Attitudes in Singapore" in *Journal of Career Assessment*.
- McClelland, David C. (1961). *The Achieving Society*. New York: The Free Press.
- Myers, Bronwyn, Penny Wurn, Dharma Palekahelu, Gomer Liufeto, Jubhar Mangimbulude, Marthen Kapa, Rohan Fisher. 2012. "Aspects of Food Production and Access to Water Resources: A Case Study at a Village in West Timor." *Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin Kritis*. Vol. XXI, No. 2, Mei-Agustus 2012, p. 134-154.
- Mirels, H. L., & Garrett, J. B. (1971). "The Protestant Ethic As a Personality Variable" in *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 36, 40-44.
- OECD, (1996). *The Implementation of an Entrepreneurship Development Strategy in Canada: The Case of the Atlantic Canada*. Canada: Organization for Economic Cooperation and Development in cooperation with Atlantic Canada Opportunity Agency.
- Palekahelu, Dharmaputra T., (2010). Marapu : Kekuatan di Balik Kekeringan Potret Masyarakat Wunga Kabupaten Sumba Timur Propinsi NTT.
- Prabowo, Ronny (2009). "Antara Kupang, Weber, dan Huntington" *Suara Pembaharuan*, 14 Maret 2009.
- Purwanto, Edi (2013). "Korelasi Antara Protestant Work Ethic (PWE) dengan Chinese Work Ethic (CWE) di Kalangan Kaum Muda Tionghoa Protestan" *Jurnal Manajemen*, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Bunda Mulia, Jakarta, Vol. 10 No. 1, p. 11-44.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman (2008). *Teori Sosiologi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Sayogyo (1994). *Kemiskinan dan Pembangunan di Propinsi Nusa Tenggara Timur*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sitorus, M. T. Felix dan Alexander Weka (1994). "Kemiskinan dan Pembangunan: Kasus Kabupaten Ende" dalam *Kemiskinan dan Pembangunan di Propinsi Nusa Tenggara Timur*, editor, Sayogyo. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Soetarto, Endriatmo (1994). "Kemiskinan dan Pembangunan: Kasus Kabupaten Kupang" dalam *Kemiskinan dan Pembangunan di Propinsi Nusa Tenggara Timur*, editor, Sayogyo. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Soenardjo (1994). "Kemiskinan dan Pembangunan: Kasus Kabupaten Timor Tengah Selatan" dalam *Kemiskinan dan Pembangunan di Propinsi Nusa Tenggara Timur*, editor, Sayogyo. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Suwondo, Kutut (2013). "Dinamika Pemerintahan Lokal di Nusa Tenggara Timur dalam Mewujudkan Paradigma "Anggur Merah", *Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin Kristis*, Vol. XXII, No. 1, Januari-Juni 2013.
- Swarsono, dan Alvin Y. So (2006). *Perubahan Sosial dan Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Weber, Max (2007). *Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme*. Yogyakarta: Penerbit Jejak.
- Weber, Max (2009). *Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wooldridge, D. R., 1958. "Richard Baxter's Social and Economic Teaching" in *A Goodly Heritage*. The Puritan Conference, Tyndale Fellowship for Biblical Research at Westminster Chapel.
- Zhang, Suchuan, and Weiqi Liu, and Xiaolang Liu (2012). "Investigating the Relationship Between Protestant Work Ethic and Confucian Dynamism: An Empirical Test in Mainland China" in *Journal of Business Ethics*, 106:243–252
- Zulfikar, Yavuz Fahir (2012). "Do Muslims Believe More in Protestant Work Ethic than Christians? Comparison of People with Different Religious Background Living in the US" in *Journal of Business Ethics*, 105:489–502.